



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 10320
TELEPON (021) 31928280, 31928285; FAKSIMILE (021) 3103705
www.bappenas.go.id

Nomor : 1221/BD.07.02/P.01/B/09/2021

8 September 2021

Lamp. : 1 (satu) berkas

Perihal : **Seleksi Program Beasiswa *Split-Site Master Program (SSMP)*
Tahun 2022**

Yth.:

1. **Kepala Biro Kepegawaian/SDM Kementerian/Lembaga;**
2. **Asisten Kepala Kepolisian Republik Indonesia Bidang Sumber Daya Manusia;**
3. **Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota (daftar terlampir).**
(Daftar terlampir)

Peningkatan kompetensi pegawai negeri sipil (PNS) sangat penting dalam mendukung sinergi perencanaan pusat dan daerah serta meningkatkan kualitas layanan dan kinerja PNS agar dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas membuka kesempatan bagi para PNS yang bekerja di Kementerian PPN/Bappenas, unit perencanaan di kementerian/lembaga, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau unit kerja setingkat yang menangani perencanaan, unit perencanaan di organisasi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, unit kerja lainnya yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan, dan/atau para PNS yang uraian pekerjaannya berhubungan dengan perencanaan pembangunan untuk mengikuti Program Beasiswa yang dikelola Pusbindiklatren Bappenas tahun 2022. Program beasiswa yang ditawarkan merupakan program beasiswa *Split-Site Master Program (SSMP)* kerja sama dengan Australia Awards in Indonesia (AAI) Tahun 2022.

Calon peserta Program Beasiswa SSMP Tahun 2022 **diharuskan mendaftar melalui** situs <http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id>. **Pendaftaran melalui faksimile dan pos-el (email) tidak kami proses lebih lanjut.**

Proses seleksi program Beasiswa SSMP Tahun 2022 meliputi tahapan seleksi administrasi, tes potensi akademik (TPA), dan *Test of English as a Foreign Language (TOEFL)* serta akan ada penambahan proses seleksi, berupa tes IELTS dan wawancara oleh *Joint Selection Team (JST) AAI*. Persyaratan administrasi berupa dokumen pendukung harus dikirimkan secara langsung dan/atau melalui jasa pengiriman ke: **Pusbindiklatren Bappenas (Beasiswa Pendidikan SSMP Tahun 2022), Jalan Proklamasi No. 70, Jakarta Pusat 10320, dengan batas akhir pendaftaran dan pengiriman berkas paling lambat tanggal 29 Oktober 2021.**

Dokumen pendukung pengusulan calon penerima beasiswa yang perlu dilengkapi adalah sebagai berikut:

1. Surat usulan dari Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD setempat dengan tembusan eselon 2 atasan langsung, yang menyebutkan nama peserta yang diusulkan dan

- telah memenuhi semua kriteria yang dipersyaratkan, belum pernah mengambil/memiliki gelar S2 untuk yang melamar beasiswa gelar S2;
2. Hasil cetak formulir registrasi *online* yang telah diisi lengkap, bermaterai, bertanda tangan asli calon peserta dan Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD serta stempel cap basah pada posisi tanda tangan Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD;
 3. Salinan ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi dan cap basah;
 4. Salinan SK kepangkatan III/a dan SK terakhir yang telah dilegalisasi;
 5. Formulir pernyataan pengembangan SDM yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD serta disesuaikan dengan Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia di masing-masing instansi (formulir terlampir); serta
 6. Dokumen Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia atau *Human Capital Development Plan* (HCDP) yang terdapat di masing-masing instansi, sesuai dengan surat kami dengan nomor 847/P.01/05/2019 pada tanggal 29 Mei 2019 perihal Hasil dan Tindak Lanjut Kegiatan Rapat Koordinasi dan Workshop Penyusunan Rencana Pengembangan SDM ASN Pembangunan.

Program Beasiswa *Split-Site Master Program* (SSMP) merupakan program yang diselenggarakan di salah satu universitas di Indonesia dan salah satu universitas di Australia. Peserta dalam program ini akan mengikuti perkuliahan selama 1 (satu) tahun di Indonesia dan 1 (satu) tahun berikutnya di Australia, serta berhak mendapatkan 2 (dua) gelar, dengan ketentuan sebagai berikut:

- *Split-Site Master Program* (SSMP) diselenggarakan di tiga program studi di Indonesia, yakni Magister Perencanaan Kepariwisata, Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung kerja sama dengan Master of International Sustainable Tourism Management, Monash University, Magister Sosiologi Universitas Gadjah Mada kerja sama dengan Master of Social Policy University of Melbourne, dan Magister Kesehatan dan Keselamatan Kerja Universitas Airlangga kerja sama dengan Master of Global Public Health, Griffith University;
- Setelah memenuhi syarat TPA, TOEFL dan wawancara tertulis, peserta akan mengikuti proses wawancara *Australia Awards in Indonesia* (AAI) dan tes IELTS pada bulan **Maret-April 2022 (tentatif)**;
- Pada tahun pertama, karyasiswa yang terpilih mengikuti *Split-Site Master Program* (SSMP) akan mengikuti kuliah di salah satu universitas di Indonesia dengan menggunakan sumber dana beasiswa Pusbindiklatren Bappenas dan selanjutnya akan mengikuti kursus persiapan Bahasa Inggris di IALF yang akan dibiayai oleh pihak *Australia Awards in Indonesia* (AAI). Pada tahun kedua, karyasiswa akan mengikuti kuliah di salah satu universitas di Australia dengan menggunakan sumber dana *Australia Awards in Indonesia* (AAI);

Dapat kami sampaikan pula bahwa sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19, proses seleksi *Split-Site Master Program* (SSMP) **rencananya akan dilaksanakan paling lambat pada Februari 2022 (tentatif)**.

Jadwal Seleksi Program Beasiswa *Split-Site Master Program* (SSMP) Kementerian PPN/Bappenas sebagai berikut:

NO	PROGRAM	WAKTU
1	Batas Akhir Pendaftaran Peserta Program <i>Split-Site Master Program</i> (SSMP) Tahun 2022	29 Oktober 2021
2	Seleksi Nasional TPA dan TOEFL <i>Split-Site Master Program</i> (SSMP) Tahun 2022	Maksimal Februari 2022*
3	Pemanggilan Peserta Ujian IELTS dan Wawancara <i>Split-Site Master Program</i> (SSMP) Tahun 2022	Maret dan April 2022*

*Keterangan : Jika ada perubahan jadwal, akan diinformasikan kemudian.

Selain itu, dapat kami informasikan bahwa Pusbindiklatren Bappenas juga berencana mengadakan kegiatan Sosialisasi dan Pemaparan Program *Split-Site Master Program* (SSMP) Tahun 2022 secara daring pada akhir November 2021. Informasi lebih lanjut perihal pendaftaran kegiatan Sosialisasi dan Pemaparan Program *Split-Site Master Program* (SSMP) Tahun 2022 akan kami informasikan melalui website dan media sosial Pusbindiklatren Bappenas.

Panduan Pelaksanaan Program *Split-Site Master Program* (SSMP) Tahun 2022 disampaikan terlampir. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh dengan menghubungi:

Kantor Pusbindiklatren Bappenas
 Bidang Penyelenggaraan Pendidikan
 Jalan Proklamasi no. 70 Jakarta Pusat 10320
 Telepon: 021 31928280, 31928285
 Pos-el: pusbindiklatren@bappenas.go.id
 Situs: <http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id>.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Kementerian/Lembaga;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten;

Yth.:

I. BIRO KEPEGAWAIAN/SDM DAN PUSDIKLAT KEMENTERIAN/LEMBAGA:

1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
2. Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Badan Intelijen Negara (BIN)
4. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
5. Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKAMLA)
6. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
7. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
8. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
9. Badan Narkotika Nasional (BNN)
10. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
11. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
12. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/Badan SAR Nasional (BASARNAS)
13. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
14. Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI)
15. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
16. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
17. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
18. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)
19. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
20. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
21. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
22. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
23. Badan Pusat Statistik (BPS)
24. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
25. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
26. Badan Standarisasi Nasional (BSN)
27. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
28. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
29. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
30. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
31. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
32. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
33. Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)
34. Kejaksaan Agung
35. Kementerian Agama

36. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
37. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
38. Kementerian Dalam Negeri
39. Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi
40. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
41. Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia
42. Kementerian Kelautan dan Perikanan
43. Kementerian Kesehatan
44. Kementerian Ketenagakerjaan
45. Kementerian Komunikasi dan Informatika
46. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
47. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
48. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
49. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia
50. Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
51. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
52. Kementerian Luar Negeri
53. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
54. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
55. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia
56. Kementerian Pemuda dan Olah Raga
57. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
58. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek
59. Kementerian Perdagangan
60. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/PPN atau Bappenas
61. Kementerian Perhubungan
62. Kementerian Perindustrian
63. Kementerian Pertahanan
64. Kementerian Pertanian
65. Kementerian Sekretariat Negara
66. Kementerian Sosial
67. Kepolisian Republik Indonesia
68. Komisi Aparatur Sipil Negara
69. Komisi Pemilihan Umum
70. Komisi Yudisial
71. Mahkamah Agung
72. Mahkamah Konstitusi
73. Ombudsman Republik Indonesia
74. Perpustakaan Nasional
75. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
76. Sekretariat Kabinet

77. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (Setjen DPR)
78. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (Setjen DPD)
79. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (Setjen MPR)

II. SETDA/BADAN/BIRO/BAGIAN KEPEGAWAIAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA:

1. Provinsi Aceh

- 1.1. Kabupaten Aceh Barat
- 1.2. Kabupaten Aceh Barat Daya
- 1.3. Kabupaten Aceh Besar
- 1.4. Kabupaten Aceh Jaya
- 1.5. Kabupaten Aceh Selatan
- 1.6. Kabupaten Aceh Singkil
- 1.7. Kabupaten Aceh Tamiang
- 1.8. Kabupaten Aceh Tengah
- 1.9. Kabupaten Aceh Tenggara
- 1.10. Kabupaten Aceh Timur
- 1.11. Kabupaten Aceh Utara
- 1.12. Kabupaten Bener Meriah
- 1.13. Kabupaten Bireuen
- 1.14. Kabupaten Gayo Lues
- 1.15. Kabupaten Nagan Raya
- 1.16. Kabupaten Pidie
- 1.17. Kabupaten Pidie Jaya
- 1.18. Kabupaten Simeule
- 1.19. Kota Banda Aceh
- 1.20. Kota Langsa
- 1.21. Kota Lhokseumawe
- 1.22. Kota Sabang
- 1.23. Kota Subulussalam

2. Provinsi Sumatera Utara

- 2.1. Kabupaten Asahan
- 2.2. Kabupaten Batubara
- 2.3. Kabupaten Dairi
- 2.4. Kabupaten Deli Serdang
- 2.5. Kabupaten Humbang Hasundutan
- 2.6. Kabupaten Karo
- 2.7. Kabupaten Labuhan Batu
- 2.8. Kabupaten Labuhan Batu Selatan
- 2.9. Kabupaten Labuhan Batu Utara
- 2.10. Kabupaten Langkat
- 2.11. Kabupaten Mandailing Natal
- 2.12. Kabupaten Nias
- 2.13. Kabupaten Nias Barat
- 2.14. Kabupaten Nias Selatan
- 2.15. Kabupaten Nias Utara
- 2.16. Kabupaten Padang Lawas
- 2.17. Kabupaten Padang Lawas Utara
- 2.18. Kabupaten Pakpak Bharat

- 2.19. Kabupaten Samosir
- 2.20. Kabupaten Serdang Bedagai
- 2.21. Kabupaten Simalungun
- 2.22. Kabupaten Tapanuli Selatan
- 2.23. Kabupaten Tapanuli Tengah
- 2.24. Kabupaten Tapanuli Utara
- 2.25. Kabupaten Toba Samosir
- 2.26. Kota Binjai
- 2.27. Kota Gunung Sitoli
- 2.28. Kota Medan
- 2.29. Kota Padangsidempuan
- 2.30. Kota Pematang Siantar
- 2.31. Kota Sibolga
- 2.32. Kota Tanjung Balai
- 2.33. Kota Tebing Tinggi

3. Provinsi Sumatera Barat

- 3.1. Kabupaten Agam
- 3.2. Kabupaten Dharmasraya
- 3.3. Kabupaten Kepulauan Mentawai
- 3.4. Kabupaten Lima Puluh Kota
- 3.5. Kabupaten Padang Pariaman
- 3.6. Kabupaten Pasaman
- 3.7. Kabupaten Pasaman Barat
- 3.8. Kabupaten Pesisir Selatan
- 3.9. Kabupaten Sijunjung
- 3.10. Kabupaten Solok
- 3.11. Kabupaten Solok Selatan
- 3.12. Kabupaten Tanah Datar
- 3.13. Kota Bukittinggi
- 3.14. Kota Padang
- 3.15. Kota Padangpanjang
- 3.16. Kota Pariaman
- 3.17. Kota Payakumbuh
- 3.18. Kota Sawahlunto
- 3.19. Kota Solok

4. Provinsi Riau

- 4.1. Kabupaten Bengkalis
- 4.2. Kabupaten Indragiri Hilir
- 4.3. Kabupaten Indragiri Hulu
- 4.4. Kabupaten Kampar
- 4.5. Kabupaten Kepulauan Meranti
- 4.6. Kabupaten Kuantan Singingi
- 4.7. Kabupaten Pelalawan
- 4.8. Kabupaten Rokan Hilir
- 4.9. Kabupaten Rokan Hulu
- 4.10. Kabupaten Siak
- 4.11. Kota Dumai
- 4.12. Kota Pekanbaru

5. Provinsi Kepulauan Riau

- 5.1. Kabupaten Bintan
- 5.2. Kabupaten Karimun
- 5.3. Kabupaten Kepulauan Anambas
- 5.4. Kabupaten Lingga
- 5.5. Kabupaten Natuna
- 5.6. Kota Batam
- 5.7. Kota Tanjung Pinang

6. Provinsi Jambi

- 6.1. Kabupaten Batanghari
- 6.2. Kabupaten Bungo
- 6.3. Kabupaten Kerinci
- 6.4. Kabupaten Merangin
- 6.5. Kabupaten Muaro Jambi
- 6.6. Kabupaten Sarolangun
- 6.7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 6.8. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- 6.9. Kabupaten Tebo
- 6.10. Kota Jambi
- 6.11. Kota Sungai Penuh

7. Provinsi Bengkulu

- 7.1. Kabupaten Bengkulu Selatan
- 7.2. Kabupaten Bengkulu Tengah
- 7.3. Kabupaten Bengkulu Utara
- 7.4. Kabupaten Kaur
- 7.5. Kabupaten Kepahiang
- 7.6. Kabupaten Lebong
- 7.7. Kabupaten Mukomuko
- 7.8. Kabupaten Rejang Lebong
- 7.9. Kabupaten Seluma
- 7.10. Kota Bengkulu

8. Provinsi Sumatera Selatan

- 8.1. Kabupaten Banyuasin
- 8.2. Kabupaten Empat Lawang
- 8.3. Kabupaten Lahat
- 8.4. Kabupaten Muara Enim
- 8.5. Kabupaten Musi Banyuasin
- 8.6. Kabupaten Musi Rawas
- 8.7. Kabupaten Musi Rawas Utara
- 8.8. Kabupaten Ogan Ilir
- 8.9. Kabupaten Ogan Komering Ilir
- 8.10. Kabupaten Ogan Komering Ulu
- 8.11. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
- 8.12. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- 8.13. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- 8.14. Kota Lubuk Linggau
- 8.15. Kota Pagar Alam

8.16. Kota Palembang

8.17. Kota Prabumulih

9. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

9.1. Kabupaten Bangka

9.2. Kabupaten Bangka Barat

9.3. Kabupaten Bangka Selatan

9.4. Kabupaten Bangka Tengah

9.5. Kabupaten Belitung

9.6. Kabupaten Belitung Timur

9.7. Kota Pangkal Pinang

10. Provinsi Lampung

10.1. Kabupaten Lampung Tengah

10.2. Kabupaten Lampung Utara

10.3. Kabupaten Lampung Selatan

10.4. Kabupaten Lampung Barat

10.5. Kabupaten Lampung Timur

10.6. Kabupaten Mesuji

10.7. Kabupaten Pesawaran

10.8. Kabupaten Pesisir Barat

10.9. Kabupaten Pringsewu

10.10. Kabupaten Tulang Bawang

10.11. Kabupaten Tulang Bawang Barat

10.12. Kabupaten Tanggamus

10.13. Kabupaten Way Kanan

10.14. Kota Bandar Lampung

10.15. Kota Metro

11. Provinsi Banten

11.1. Kabupaten Lebak

11.2. Kabupaten Pandeglang

11.3. Kabupaten Serang

11.4. Kabupaten Tangerang

11.5. Kota Cilegon

11.6. Kota Serang

11.7. Kota Tangerang

11.8. Kota Tangerang Selatan

12. Provinsi Jawa Barat

12.1. Kabupaten Bandung

12.2. Kabupaten Bandung Barat

12.3. Kabupaten Bekasi

12.4. Kabupaten Bogor

12.5. Kabupaten Ciamis

12.6. Kabupaten Cianjur

12.7. Kabupaten Cirebon

12.8. Kabupaten Garut

12.9. Kabupaten Indramayu

12.10. Kabupaten Karawang

- 12.11. Kabupaten Kuningan
- 12.12. Kabupaten Majalengka
- 12.13. Kabupaten Pangandaran
- 12.14. Kabupaten Purwakarta
- 12.15. Kabupaten Subang
- 12.16. Kabupaten Sukabumi
- 12.17. Kabupaten Sumedang
- 12.18. Kabupaten Tasikmalaya
- 12.19. Kota Bandung
- 12.20. Kota Banjar
- 12.21. Kota Bekasi
- 12.22. Kota Bogor
- 12.23. Kota Cimahi
- 12.24. Kota Cirebon
- 12.25. Kota Depok
- 12.26. Kota Sukabumi
- 12.27. Kota Tasikmalaya

13. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

- 13.1. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- 13.2. Kota Administrasi Jakarta Barat
- 13.3. Kota Administrasi Jakarta Pusat
- 13.4. Kota Administrasi Jakarta Selatan
- 13.5. Kota Administrasi Jakarta Timur
- 13.6. Kota Administrasi Jakarta Utara

14. Provinsi Jawa Tengah

- 14.1. Kabupaten Banjarnegara
- 14.2. Kabupaten Banyumas
- 14.3. Kabupaten Batang
- 14.4. Kabupaten Blora
- 14.5. Kabupaten Boyolali
- 14.6. Kabupaten Brebes
- 14.7. Kabupaten Cilacap
- 14.8. Kabupaten Demak
- 14.9. Kabupaten Grobogan
- 14.10. Kabupaten Jepara
- 14.11. Kabupaten Karanganyar
- 14.12. Kabupaten Kebumen
- 14.13. Kabupaten Kendal
- 14.14. Kabupaten Klaten
- 14.15. Kabupaten Kudus
- 14.16. Kabupaten Magelang
- 14.17. Kabupaten Pati
- 14.18. Kabupaten Pekalongan
- 14.19. Kabupaten Pemalang
- 14.20. Kabupaten Purbalingga
- 14.21. Kabupaten Purworejo
- 14.22. Kabupaten Rembang
- 14.23. Kabupaten Semarang

- 14.24. Kabupaten Sragen
- 14.25. Kabupaten Sukoharjo
- 14.26. Kabupaten Tegal
- 14.27. Kabupaten Temanggung
- 14.28. Kabupaten Wonogiri
- 14.29. Kabupaten Wonosobo
- 14.30. Kota Magelang
- 14.31. Kota Pekalongan
- 14.32. Kota Salatiga
- 14.33. Kota Semarang
- 14.34. Kota Surakarta
- 14.35. Kota Tegal

15. Provinsi Jawa Timur

- 15.1. Kabupaten Bangkalan
- 15.2. Kabupaten Banyuwangi
- 15.3. Kabupaten Blitar
- 15.4. Kabupaten Bojonegoro
- 15.5. Kabupaten Bondowoso
- 15.6. Kabupaten Gresik
- 15.7. Kabupaten Jember
- 15.8. Kabupaten Jombang
- 15.9. Kabupaten Kediri
- 15.10. Kabupaten Lamongan
- 15.11. Kabupaten Lumajang
- 15.12. Kabupaten Madiun
- 15.13. Kabupaten Magetan
- 15.14. Kabupaten Malang
- 15.15. Kabupaten Mojokerto
- 15.16. Kabupaten Nganjuk
- 15.17. Kabupaten Ngawi
- 15.18. Kabupaten Pacitan
- 15.19. Kabupaten Pamekasan
- 15.20. Kabupaten Pasuruan
- 15.21. Kabupaten Ponorogo
- 15.22. Kabupaten Probolinggo
- 15.23. Kabupaten Sampang
- 15.24. Kabupaten Sidoarjo
- 15.25. Kabupaten Situbondo
- 15.26. Kabupaten Sumenep
- 15.27. Kabupaten Trenggalek
- 15.28. Kabupaten Tuban
- 15.29. Kabupaten Tulungagung
- 15.30. Kota Batu
- 15.31. Kota Blitar
- 15.32. Kota Kediri
- 15.33. Kota Madiun
- 15.34. Kota Malang
- 15.35. Kota Mojokerto
- 15.36. Kota Pasuruan

15.37. Kota Probolinggo

15.38. Kota Surabaya

16. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

16.1. Kabupaten Bantul

16.2. Kabupaten Gunungkidul

16.3. Kabupaten Kulon Progo

16.4. Kabupaten Sleman

16.5. Kota Yogyakarta

17. Provinsi Bali

17.1. Kabupaten Badung

17.2. Kabupaten Bangli

17.3. Kabupaten Buleleng

17.4. Kabupaten Gianyar

17.5. Kabupaten Jembrana

17.6. Kabupaten Karangasem

17.7. Kabupaten Klungkung

17.8. Kabupaten Tabanan

17.9. Kota Denpasar

18. Provinsi Nusa Tenggara Barat

18.1. Kabupaten Bima

18.2. Kabupaten Dompu

18.3. Kabupaten Lombok Barat

18.4. Kabupaten Lombok Tengah

18.5. Kabupaten Lombok Timur

18.6. Kabupaten Lombok Utara

18.7. Kabupaten Sumbawa

18.8. Kabupaten Sumbawa Barat

18.9. Kota Bima

18.10. Kota Mataram

19. Provinsi Nusa Tenggara Timur

19.1. Kabupaten Alor

19.2. Kabupaten Belu

19.3. Kabupaten Ende

19.4. Kabupaten Flores Timur

19.5. Kabupaten Kupang

19.6. Kabupaten Lembata

19.7. Kabupaten Malaka

19.8. Kabupaten Manggarai

19.9. Kabupaten Manggarai Barat

19.10. Kabupaten Manggarai Timur

19.11. Kabupaten Ngada

19.12. Kabupaten Nagekeo

19.13. Kabupaten Rote Ndao

19.14. Kabupaten Sabu Raijua

19.15. Kabupaten Sikka

19.16. Kabupaten Sumba Barat

- 19.17. Kabupaten Sumba Barat Daya
- 19.18. Kabupaten Sumba Tengah
- 19.19. Kabupaten Sumba Timur
- 19.20. Kabupaten Timur Tengah Selatan
- 19.21. Kabupaten Timur Tengah Utara
- 19.22. Kota Kupang

20. Provinsi Kalimantan Barat

- 20.1. Kabupaten Bengkayang
- 20.2. Kabupaten Kapuas Hulu
- 20.3. Kabupaten Kayong Utara
- 20.4. Kabupaten Ketapang
- 20.5. Kabupaten Kubu Raya
- 20.6. Kabupaten Landak
- 20.7. Kabupaten Melawi
- 20.8. Kabupaten Mempawah
- 20.9. Kabupaten Sambas
- 20.10. Kabupaten Sanggau
- 20.11. Kabupaten Sekadau
- 20.12. Kabupaten Sintang
- 20.13. Kota Pontianak
- 20.14. Kota Singkawang

21. Provinsi Kalimantan Selatan

- 21.1. Kabupaten Balangan
- 21.2. Kabupaten Banjar
- 21.3. Kabupaten Barito Kuala
- 21.4. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- 21.5. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- 21.6. Kabupaten Hulu Sungai Utara
- 21.7. Kabupaten Kotabaru
- 21.8. Kabupaten Tabalong
- 21.9. Kabupaten Tanah Bumbu
- 21.10. Kabupaten Tanah Laut
- 21.11. Kabupaten Tapin
- 21.12. Kota Banjarbaru
- 21.13. Kota Banjarmasin

22. Provinsi Kalimantan Tengah

- 22.1. Kabupaten Barito Selatan
- 22.2. Kabupaten Barito Timur
- 22.3. Kabupaten Barito Utara
- 22.4. Kabupaten Gunung Mas
- 22.5. Kabupaten Kapuas
- 22.6. Kabupaten Katingan
- 22.7. Kabupaten Kotawaringin Barat
- 22.8. Kabupaten Kotawaringin Timur
- 22.9. Kabupaten Lamandau
- 22.10. Kabupaten Murung Raya
- 22.11. Kabupaten Pulang Pisau

- 22.12. Kabupaten Sukamara
- 22.13. Kabupaten Seruyan
- 22.14. Kota Palangkaraya

23. Provinsi Kalimantan Timur

- 23.1. Kabupaten Berau
- 23.2. Kabupaten Kutai Barat
- 23.3. Kabupaten Kutai Kartanegara
- 23.4. Kabupaten Kutai Timur
- 23.5. Kabupaten Mahakam Ulu
- 23.6. Kabupaten Paser
- 23.7. Kabupaten Panajam Paser Utara
- 23.8. Kota Balikpapan
- 23.9. Kota Bontang
- 23.10. Kota Samarinda

24. Provinsi Kalimantan Utara

- 24.1. Kabupaten Bulungan
- 24.2. Kabupaten Malinau
- 24.3. Kabupaten Nunukan
- 24.4. Kabupaten Tana Tidung
- 24.5. Kota Tarakan

25. Provinsi Gorontalo

- 25.1. Kabupaten Boalemo
- 25.2. Kabupaten Bone Bolango
- 25.3. Kabupaten Gorontalo
- 25.4. Kabupaten Gorontalo Utara
- 25.5. Kabupaten Pohuwato
- 25.6. Kota Gorontalo

26. Provinsi Sulawesi Selatan

- 26.1. Kabupaten Bantaeng
- 26.2. Kabupaten Barru
- 26.3. Kabupaten Bone
- 26.4. Kabupaten Bulukumba
- 26.5. Kabupaten Enrekang
- 26.6. Kabupaten Gowa
- 26.7. Kabupaten Jeneponto
- 26.8. Kabupaten Kepulauan Selayar
- 26.9. Kabupaten Luwu
- 26.10. Kabupaten Luwu Timur
- 26.11. Kabupaten Luwu Utara
- 26.12. Kabupaten Maros
- 26.13. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- 26.14. Kabupaten Pinrang
- 26.15. Kabupaten Sidenreng Rappang
- 26.16. Kabupaten Sinjai
- 26.17. Kabupaten Soppeng
- 26.18. Kabupaten Takalar

- 26.19. Kabupaten Tana Toraja
- 26.20. Kabupaten Toraja Utara
- 26.21. Kabupaten Wajo
- 26.22. Kota Makassar
- 26.23. Kota Palopo
- 26.24. Kota Parepare

27. Provinsi Sulawesi Tenggara

- 27.1. Kabupaten Bombana
- 27.2. Kabupaten Buton
- 27.3. Kabupaten Buton Selatan
- 27.4. Kabupaten Buton Tengah
- 27.5. Kabupaten Buton Utara
- 27.6. Kabupaten Kolaka
- 27.7. Kabupaten Kolaka Timur
- 27.8. Kabupaten Kolaka Utara
- 27.9. Kabupaten Konawe
- 27.10. Kabupaten Konawe Kepulauan
- 27.11. Kabupaten Konawe Selatan
- 27.12. Kabupaten Konawe Utara
- 27.13. Kabupaten Muna
- 27.14. Kabupaten Muna Barat
- 27.15. Kabupaten Wakatobi
- 27.16. Kota Bau Bau
- 27.17. Kota Kendari

28. Provinsi Sulawesi Tengah

- 28.1. Kabupaten Banggai
- 28.2. Kabupaten Banggai Kepulauan
- 28.3. Kabupaten Banggai Laut
- 28.4. Kabupaten Buol
- 28.5. Kabupaten Donggala
- 28.6. Kabupaten Morowali
- 28.7. Kabupaten Morowali Utara
- 28.8. Kabupaten Parigi Moutong
- 28.9. Kabupaten Poso
- 28.10. Kabupaten Sigi
- 28.11. Kabupaten Tojo Una-Una
- 28.12. Kabupaten Tolitoli
- 28.13. Kota Palu

29. Provinsi Sulawesi Utara

- 29.1. Kabupaten Bolaang Mongondow
- 29.2. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
- 29.3. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- 29.4. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- 29.5. Kabupaten Kepulauan Sangihe
- 29.6. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
- 29.7. Kabupaten Kepulauan Talaud
- 29.8. Kabupaten Minahasa

- 29.9. Kabupaten Minahasa Selatan
- 29.10. Kabupaten Minahasa Tenggara
- 29.11. Kabupaten Minahasa Utara
- 29.12. Kota Bitung
- 29.13. Kota Kotamobagu
- 29.14. Kota Manado
- 29.15. Kota Tomohon

30. Provinsi Sulawesi Barat

- 30.1. Kabupaten Majene
- 30.2. Kabupaten Mamasa
- 30.3. Kabupaten Mamuju
- 30.4. Kabupaten Mamuju Tengah
- 30.5. Kabupaten Mamuju Utara
- 30.6. Kabupaten Polewali Mandar

31. Provinsi Maluku

- 31.1. Kabupaten Buru
- 31.2. Kabupaten Buru Selatan
- 31.3. Kabupaten Kepulauan Aru
- 31.4. Kabupaten Maluku Barat Daya
- 31.5. Kabupaten Maluku Tengah
- 31.6. Kabupaten Maluku Tenggara
- 31.7. Kabupaten Maluku Tenggara Barat
- 31.8. Kabupaten Kepulauan Seram Barat
- 31.9. Kabupaten Kepulauan Seram Timur
- 31.10. Kota Ambon
- 31.11. Kota Tual

32. Provinsi Maluku Utara

- 32.1. Kabupaten Halmahera Barat
- 32.2. Kabupaten Halmahera Tengah
- 32.3. Kabupaten Halmahera Timur
- 32.4. Kabupaten Halmahera Utara
- 32.5. Kabupaten Halmahera Selatan
- 32.6. Kabupaten Kepulauan Sula
- 32.7. Kabupaten Pulau Morotai
- 32.8. Kabupaten Pulau Taliabu
- 32.9. Kota Ternate
- 32.10. Kota Tidore Kepulauan

33. Provinsi Papua

- 33.1. Kabupaten Asmat
- 33.2. Kabupaten Biak Numfor
- 33.3. Kabupaten Boven Digoel
- 33.4. Kabupaten Deiyai
- 33.5. Kabupaten Dogiyai
- 33.6. Kabupaten Intan Jaya
- 33.7. Kabupaten Jayapura
- 33.8. Kabupaten Jayawijaya

- 33.9. Kabupaten Keerom
- 33.10. Kabupaten Kepulauan Yapen
- 33.11. Kabupaten Lanny Jaya
- 33.12. Kabupaten Memberamo Raya
- 33.13. Kabupaten Memberamo Tengah
- 33.14. Kabupaten Mappi
- 33.15. Kabupaten Merauke
- 33.16. Kabupaten Mimika
- 33.17. Kabupaten Nabire
- 33.18. Kabupaten Nduga
- 33.19. Kabupaten Paniai
- 33.20. Kabupaten Pegunungan Bintang
- 33.21. Kabupaten Puncak
- 33.22. Kabupaten Puncak Jaya
- 33.23. Kabupaten Sarmi
- 33.24. Kabupaten Supiori
- 33.25. Kabupaten Tolikara
- 33.26. Kabupaten Waropen
- 33.27. Kabupaten Yahukimo
- 33.28. Kabupaten Yalimo
- 33.29. Kota Jayapura

34. Provinsi Papua Barat

- 34.1. Kabupaten Fakfak
- 34.2. Kabupaten Kaimana
- 34.3. Kabupaten Manokwari
- 34.4. Kabupaten Manokwari Selatan
- 34.5. Kabupaten Maybrat
- 34.6. Kabupaten Pegunungan Arfak
- 34.7. Kabupaten Raja Ampat
- 34.8. Kabupaten Sorong
- 34.9. Kabupaten Sorong Selatan
- 34.10. Kabupaten Tambrau
- 34.11. Kabupaten Teluk Bintuni
- 34.12. Kabupaten Teluk Wondama
- 34.13. Kota Sorong

PROGRAM BEASISWA

Persyaratan Program Beasiswa

Berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 perihal Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar, dengan ini kami informasikan bahwa untuk Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas tahun 2019 akan mengacu kepada persyaratan yang tercantum dalam Surat Edaran Kemenpan RB tersebut dan atau disesuaikan dengan persyaratan dari masing-masing instansi untuk penetapan tugas belajar, yakni:

NO	PERSYARATAN	SSMP
1	SYARAT ADMINISTRATIF	
	Pengusulan Dari Instansi	Eselon II bidang Kepegawaian
	Unit Kerja	Unit Kerja Perencanaan
	PNS 100% Minimal Gol IIIA	1 Tahun
	Strata Pendidikan Min.	S1*
	Minimal Tahun Lulus S1	2 Tahun
	Umur Maksimal**	37 Tahun**
	IPK Minimal	2.9
	Surat Keterangan Rencana Pengembangan SDM	Eselon II bidang Kepegawaian

NO	PERSYARATAN	SSMP
2	SELEKSI NASIONAL	
	Tes Potensi Akademik	
	Pusat	565
	Pusat Luar Jawa	525
	Pemerintah Daerah di Jawa	525
	Pemerintah Daerah di Luar Jawa	500
	TOEFL Minimal	525
	Wawancara Tertulis	Menunjukkan Komitmen

Keterangan :

*Diprioritaskan dengan latar belakang pendidikan S1 yang linear dengan jurusannya

Batas maksimal usia pendaftar ialah **37 tahun 0 bulan per 1 Agustus 2022.

Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 perihal Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar, kami informasikan juga bahwa untuk daerah-daerah terpencil, tertinggal dan terluar (daftar daerah terlampir), usia maksimal dapat ditetapkan menjadi :

- a) Program Strata II (S-2) atau setara (baik S2 Dalam Negeri maupun S2 *Linkage*), berusia maksimal 42 (empat puluh dua) tahun*;
- b) Program Strata III (S-3) atau setara (baik S3 Dalam Negeri), berusia maksimal 47 (empat puluh tujuh) tahun*.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63/2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 berikut ini daftar daerah tertinggal yang berjumlah 62 kabupaten.

NO	PROVINSI	KABUPATEN
1	Sumatera Utara	Nias
2	Sumatera Utara	Nias Selatan
3	Sumatera Utara	Nias Utara
4	Sumatera Utara	Nias Barat
5	Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai
6	Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara
7	Lampung	Pesisir Barat
8	Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara
9	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat
10	Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur
11	Nusa Tenggara Timur	Kupang
12	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan
13	Nusa Tenggara Timur	Belu
14	Nusa Tenggara Timur	Alor
15	Nusa Tenggara Timur	Lembata
16	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao
17	Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah
18	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya
19	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Timur
20	Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua
21	Nusa Tenggara Timur	Malaka
22	Sulawesi Tengah	Donggala

NO	PROVINSI	KABUPATEN
23	Sulawesi Tengah	Tojo Una-Una
24	Sulawesi Tengah	Sigi
25	Maluku	Maluku Tenggara Barat
26	Maluku	Kepulauan Aru
27	Maluku	Seram Bagian Barat
28	Maluku	Seram Bagian Timur
29	Maluku	Maluku Barat Daya
30	Maluku	Buru Selatan
31	Maluku Utara	Kepulauan Sula
32	Maluku Utara	Pulau Taliabu
33	Papua Barat	Teluk Wondama
34	Papua Barat	Teluk Bintuni
35	Papua Barat	Sorong Selatan
36	Papua Barat	Sorong
37	Papua Barat	Tambrau
38	Papua Barat	Maybrat
39	Papua Barat	Manokwari Selatan
40	Papua Barat	Pegunungan Arfak
41	Papua	Jayawijaya
42	Papua	Nabire
43	Papua	Paniai
44	Papua	Puncak Jaya
45	Papua	Boven Digoel
46	Papua	Mappi

NO	PROVINSI	KABUPATEN
47	Papua	Asmat
48	Papua	Yahukimo
49	Papua	Pegunungan Bintang
50	Papua	Tolikara
51	Papua	Keerom
52	Papua	Waropen
53	Papua	Supiori
54	Papua	Mamberamo Raya
55	Papua	Nduga
56	Papua	Lanny Jaya
57	Papua	Mamberamo Tengah
58	Papua	Yalimo
59	Papua	Puncak
60	Papua	Dogiyai
61	Papua	Intan Jaya
62	Papua	Deiyai

*Hanya berlaku untuk PNS yang berasal dari Pemerintah Kota/Kabupaten di atas.

Pilihan Program Studi SSMP Tahun 2022

NO	PROGRAM STUDI
1	Magister Perencanaan Kepariwisata, Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung
2	Magister Sosiologi Universitas Gadjah Mada
3	Magister Kesehatan dan Keselamatan Kerja Universitas Airlangga

Prosedur Pelamaran

1. Mereka yang berhak melamar program beasiswa Pusbindiklatren adalah mereka yang memenuhi persyaratan seperti yang disebutkan di atas dan belum pernah mengambil/memiliki gelar S2;
2. Peserta yang telah memenuhi persyaratan di atas, diharuskan mengisi formulir pendaftaran **secara online** dan diusulkan secara resmi oleh instansi asalnya melalui Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD setempat dengan tembusan eselon 2 atasan langsung. Surat usulan yang dimaksud harus menyebutkan nama-nama pegawai yang diusulkan oleh instansi serta program beasiswa yang diminati;
3. Peserta yang diprioritaskan adalah: a) Fungsional Perencana; b) Perencana di Instansi Perencanaan dan/atau yang bekerja di unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di Bidang Perencanaan; dan c) PNS yang uraian pekerjaannya berhubungan dengan perencanaan pembangunan;
4. Pusbindiklatren mengirimkan berkas penawaran beasiswa Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2022 ke seluruh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota maupun Kementerian/Lembaga melalui kepegawaian masing-masing instansi. Selain itu, kami juga mengunggah berkas penawaran beasiswa Pusbindiklatren pada situs Pusbindiklatren Bappenas di <http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id>;
5. **Jika peserta mengalami kesulitan** dalam proses registrasi *online*, peserta diperkenankan menggunakan formulir manual yang terdapat dalam lampiran;
6. Pusbindiklatren hanya akan menindaklanjuti formulir pendaftaran yang **bermaterai, bertandatangan asli dan stempel cap basah** dengan persetujuan dari Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD setempat dengan tembusan eselon 2 atasan langsung;
7. Peserta yang memenuhi syarat administrasi (MS), lulus TPA dan TOEFL akan diproses untuk seleksi penempatan selama 2 tahun (selama nilai TPA dan TOEFLnya masih berlaku), **dengan syarat** diusulkan kembali oleh pejabat pengelola kepegawaian (minimal Pejabat Eselon II), kecuali ada surat pembatalan pencalonan dari instansi asalnya (minimal Pejabat Eselon II);
8. Formulir pendaftaran harus disertai/dilengkapi dengan dokumen pendukung yaitu:
 - a) Surat usulan dari Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD setempat dengan tembusan eselon 2 atasan langsung, yang menyebutkan nama peserta yang diusulkan dan telah memenuhi semua kriteria yang dipersyaratkan, belum pernah mengambil/memiliki gelar S2;

- b) Salinan ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi dan cap basah;
- c) Salinan SK kepangkatan III/a dan SK terakhir yang telah dilegalisasi;
- d) Formulir pernyataan pengembangan SDM yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD serta disesuaikan dengan Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia di masing-masing instansi;
- e) Dokumen Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia atau *Human Capital Development Plan* (HCDP) yang terdapat di masing-masing instansi, sesuai dengan surat kami dengan nomor 847/P.01/05/2019 pada tanggal 29 Mei 2019 perihal Hasil dan Tindak Lanjut Kegiatan Rapat Koordinasi dan Workshop Penyusunan Rencana Pengembangan SDM ASN Pembangunan;
- f) Khusus bagi para Pejabat Fungsional Perencana harus melampirkan SK jabatan terakhir yang dilegalisasi; serta
- g) Pernyataan Rencana Studi (dalam bentuk esai), sebagaimana format terlampir.

Komponen Biaya

Informasi terkait dengan biaya yang ditanggung oleh Pusbindiklatren Bappenas serta biaya yang ditanggung oleh instansi asal, mengacu kepada Buku Panduan Karyasiswa Tahun 2020 serta Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pembiayaan Bersama (*Cost Sharing*) Dalam Penyelenggaraan Program Beasiswa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (surat terlampir)

Sanksi

1. Jika dalam hal tertentu peserta memutuskan untuk mengundurkan diri dari program studi secara sepihak, maka berdasarkan Surat Perjanjian, **peserta harus mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Pusbindiklatren sejak proses seleksi hingga tanggal keputusan pembatalan pemberian beasiswa kepada kas negara**, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 1961, Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961, dan Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 perihal Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;
2. Peserta akan **dikenakan sanksi** jika dalam proses seleksi, penempatan, maupun selama mengikuti pendidikan, Pusbindiklatren menemukan data yang tidak sesuai dalam Formulir Calon Penerima Beasiswa Pusbindiklatren (formulir pendaftaran) maupun dengan kriteria seleksi Pusbindiklatren;
3. Sanksi yang dimaksud pada *point* di atas dapat berupa:
 - a) Pembatalan pencalonan sebagai penerima beasiswa jika diketahui sebelum proses seleksi dilakukan;
 - b) Pembatalan pemberian beasiswa dan penggantian biaya seleksi jika diketahui dalam proses penempatan;
 - c) Pertimbangan kembali terhadap instansi dan/atau unit kerja terkait dalam proses penempatan karyasiswa di kemudian hari.

LAMPIRAN**Format Pernyataan Rencana Studi**

- Paragraf 1 : Latar Belakang Pendidikan sebelumnya, S1 untuk yang bermaksud mengambil program S2;
- Paragraf 2 : Riwayat pekerjaan atau pengalaman kerja yang berisikan uraian tugas dan fungsi pokok pekerjaan sehari-hari;
- Paragraf 3 : Alasan memilih bidang studi yang diinginkan serta dikaitkan dengan latar belakang pendidikan sebelumnya dan dengan tugas dan fungsi pokok pekerjaan sehari-hari;
- Paragraf 4 : Rencana penelitian untuk tugas akhir Saudara yang dapat memberikan manfaat secara langsung terhadap instansi/institusi tempat Saudara bertugas dan pembangunan Indonesia

Panduan Registrasi *Online*

Pendaftaran bagi peserta baru dan belum pernah sama sekali mengikuti diklat di Pusbindiklatren Bappenas:

1. Silakan masuk ke Menu DAFTAR: <http://pusbindiklatren.bappenas.go.id/daftar>
2. Masukkan NIP Anda lalu  klik CEK
3. Apabila Anda belum terdaftar, lalu isikan: *User Name*, Nama Lengkap, Email, *Password*, *Re-Password* lalu  klik DAFTAR.
4. Kemudian silahkan Anda cek di email untuk melihat notifikasi pemberitahuan aktivasi akun Anda.
5. Lalu  klik link aktivasi, nanti akan diarahkan ke halaman lain.
6. Bila ada pertanyaan atau *Alert*  klik OK
7. Kemudian *Login* dengan memasukkan NIP dan *Password* yang sebelumnya sudah dibuat.

Pendaftaran bagi peserta yang sebelumnya sudah pernah mengikuti diklat di Pusbindiklatren Bappenas:

1. Untuk mendapatkan *username* dan *password* masuk ke Menu ***Lupa Password***: <http://pusbindiklatren.bappenas.go.id/daftar/forgot.php>;
2. Masukkan *email* yang sebelumnya pernah didaftarkan, jika nanti *email* Anda belum terdaftar di data Diklat Pusbindiklatren Bappenas, silakan Anda mengirim *email* ke Pusbindiklatren Bappenas dengan *email address*: pusbindiklatren@bappenas.go.id Perihal *up date email* Anda;
3. Lalu  klik KIRIM;
4. Kemudian lihat *email* dan  klik *link Forgot Password*;
5. Jika terdapat peringatan/*Alert*  klik OK;
6. Silakan  klik DIKLAT GELAR/DIKLAT NON GELAR;
7. Lalu isikan formulir yang sudah tersedia;
8. Setelah formulir diisikan semua lalu  klik DAFTAR/UBAH;
9. Untuk mendapatkan formulir yang sudah diisikan  klik UNDUH;

**PUSBINDIKLATREN BAPPENAS
FORMULIR CALON PENERIMA BEASISWA PROGRAM PASCASARJANA
(ISILAH SEMUA KETERANGAN DENGAN JELAS DAN BENAR.
HARUS DIISI DENGAN HURUF BALOK)**

-
1. Nama Lengkap (Sesuai Ijazah Terakhir) :
 2. NIP :
 3. Tempat, Tanggal Lahir :
 - Jenis Kelamin : L/P
 4. Alamat Rumah :
 - Kode Pos :
 - Kota/Kabupaten :
 - Provinsi :
 - Telepon/Handphone :
 5. Email Address :
 6. Instansi (Pemkot/Pemkab/Pemprov/KL) :
 7. Unit Kerja Eselon II/III :
 8. Alamat Kantor :
 - Kode Pos :
 - Kota/Kabupaten :
 - Provinsi :
 - Telepon/Handphone :
 - Email Instansi :
 9. Jabatan :
 - Golongan :
 10. Unit/Bagian Tempat Bekerja :
 - Apakah Unit Kerja Saudara berkaitan dengan bidang perencanaan? Ya/Tidak
 - Apakah Pekerjaan Saudara berkaitan dengan bidang perencanaan? Ya/Tidak
 11. Uraikan Secara Singkat Pekerjaan Saudara :
.....
.....
.....
.....
 - TMT PNS 100 % Golongan III/A pada S1 :
 - Masa Kerja sejak 100 % Golongan III/A :

.....
.....

Dengan ini kami menyatakan bahwa, informasi di atas adalah yang sebenarnya. Jika dikemudian hari diketahui ada informasi yang tidak benar, maka kami bersedia menerima segala sanksi yang ditetapkan oleh Pusbindiklatren Bappenas.

....., 2021

Menyetujui,
(Kepala BKD/Kepala Biro SDM)
(TTD dan Cap Basah)

Yang Bersangkutan,
(Materai 10.000 Rupiah)

(.....) (.....)

Catatan : Formulir dapat digandakan, dan yang diproses hanya yang bertanda tangan dan bermeterai asli. Harap melampirkan Surat Usulan, FC ijazah dan transkrip, serta SK pangkat terakhir yang dilegalisir.

KOP SURAT
BKD/BIRO KEPEGAWAIAN/BIRO SDM
SURAT PERNYATAAN PENGEMBANGAN SDM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

Dengan ini merangkan bahwa, pegawai atas nama:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

Adalah ASN pada instansi tersebut di atas dan yang bersangkutan memilih program studi beasiswa Pusbindiklatren dengan urutan pilihan program studi sebagai berikut:

1.
2.
3.

Pilihan-pilihan program studi tersebut sudah sesuai dengan rencana pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada instansi peserta tersebut, sehingga diharapkan keikutsertaan pegawai tersebut akan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan serta peningkatan kinerja instansi/institusi pegawai tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya tanda tangani untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... 2021

Kepala BKD/Kepala Biro SDM,

(Materai 10.000 Rupiah, TTD dan Cap Basah)

(.....)
NIP

Tembusan:
Atasan langsung yang bersangkutan.